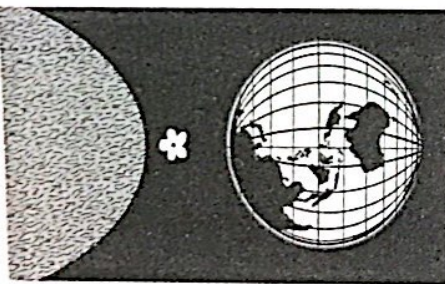


Ibukota, Kutei, dan Katulistiwa

28 Agustus 2019 menjadi tanggal paling penting yang mengakhiri kasak-kusuk jadh tidaknya ibukota negara dipindah. Presiden Joko Widodo sendiri yang langsung mengumumkannya. Sontak, pengumuman ini mengundang ragam opini, terutama dari perspektif politik. Publik sudah cukup lelah dengan isu yang satu ini. Saban Jakarta didera kemacetan, banjir, polusi akut dsb, saat itu juga wacana pemindahan ibukota mengembara. Memang, terutama secara ekologis, Jakarta sudah tidak memungkinkan lagi menanggung beban begitu banyak masalah. Alasan lain, misal ekonomi dan politik bisa menjadi pelembing, meski perspektif ini kadang masih abu-abu.

Keputusan maha penting dari presiden juga mengakhiri teka-teki di mana ibukota itu akan berpindah. Padahal ingatan kolektif publik masih terakam jelas saat Kalimantan Tengah digadang-gadang menjadi ibukota masa depan Indonesia. Usaha ke arah itu juga sudah lama dicanangkan. Presiden Pertama, Soekarno bahkan menandai sendiri keinginannya memilih Kalimantan Tengah dengan meresmikan "Tugu Soekarno" pada 17 April 1957. Saat itu pula Palangka Raya dipercaantik cukup massif.

Alasan kunci Soekarno ingin memindahkan ibukota, bukan



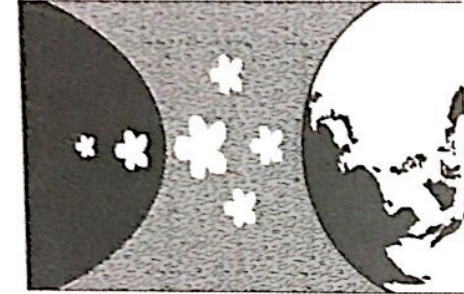
karena *sebal* dengan Jakarta yang ternyata belakangan kapasitasnya sangat terbatas, tetapi untuk membagi beban Jakarta dengan kota lainnya. Meskipun alasan ekologis juga tetap menjadi prioritas, misalnya Palangka Raya bebas bencana gempa, banjir dsb, masalah yang sangat *ihlan* dari Jakarta. Alasan pemindahannya, Soekarno ingin menampilkan wajah baru kepada dunia, termasuk kekayaan budaya yang diwakili oleh banyak daerah di Indonesia.

Sayang, janji pemerintahan Soekarno itu akhirnya mandeg. Hanya dibahas, tapi tak pernah direalisasikan. Ada banyak per-

soalan sehingga ide futuristik itu tak pernah benar-benar nyata. Padahal, beberapa negara kipun dengan alasan yang mungkin tak serupa dengan Indonesia, berhasil membagi beban sebuah ibukota. Satu kota sebagai pusat pemerintahan, satunya lagi sebagai pusat bisnis. Amerika menjadi contoh paling baik dengan Washington DC sebagai pusat pemerintahan, dan New York sebagai pusat bisnis. Begitu juga Belanda dengan Den Haag dan Amsterdam. Negara tetangga, Malaysia tak mau ketinggalan, dan mulai sukses dengan Kuala Lumpur dan Putra Jaya. Bahkan mereka sudah melakukannya sejak 1999.

Sebuah ibukota negara pindah, dengan alasan tertentu adalah kenisyaan. Indonesia pernah mengalaminya. Misalnya, pada 1946 sempat "diungsikan" genting saat agresi militer dilancarkan Belanda. Kini, ibukota pindah tidak harus ke Kalimantan Timur juga tidak masalah, karena sebelumnya santer terdengar ibukota bisa saja ke Longgol, Jawa Barat. Tapi berbagai pilihan itu tentu tidak semudah hanya sekadar pindah. Ada banyak pertimbangan multidimensi. Bukan saja menyangkut persoalan hari ini, tetapi untuk jangka panjang, melintasi banyak generasi.

1 Nyoman Yoga Segara



Jika ingin populer, Presiden Jokowi sebenarnya bisa saja mengimulasi ide Soekarno dengan menentukan Palangka Raya sebagai ibukota yang secara historis memang sudah di siapkan matang. Tak perlu sibuk dan repot, apalagi bolak-balik melihat beberapa calon wilayah karena diketahui, selain Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan juga menjadi kandidat kuat. Dengan keputusan populer, pro-kontra terhadap keputusan presiden mungkin tak *seheboh* saat ini. Tapi, Jokowi berani mengambil resiko lam dengan menetapkan ibukota di Kabupaten Penajam dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.

Keputusan pemerintah memindahkan ibukota ke Kutei juga menjadi perbincangan hangat diberbagai komunitas, termasuk umat beragama. Umat Hindu, misalnya menyambut ide ini dengan bersorak eforia. Masalahnya sederhana, ibukota negara akan "kembali" ke pusat kerajaan Hindu pertama di Indonesia. Banyak yang menganggap, pemindahan ini sebagai tanda-tanda jaman kebangkitan Hindu. Mungkin ini pemindahan ibukota tidak lagi menjadi berita mewah jika umat Hindu hanya menjadi penonton. Eforia ini juga bisa saja lewat begitu saja, dan tak berarti apa-

akui saat kemerdekaan dideklarasikan pada 17 Agustus 1945. Karena itu, payung besar Garis Katulistiwa meminta kita lebih banyak mendorong ke-ik-a-an, kesatuan, persatuan. Diskursus ini tidak saja jauh lebih penting tapi juga jauh lebih sulit.

Dari, pemindahan ibukota tidak bisa hanya dianggap sebagai isu umat Hindu semata, yang artefak sejarah masa lalu yang masih tertangkap di Kutei, tetapi isu untuk semua umat beragama, karena seelah kepastian ibukota pindah, relasi sosial-budaya akan segera dimulai lagi. Begitu juga relasi agama dan negara akan kembali mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara di ibukota baru itu nanti. Pemindahan ibukota juga menyangkut *mindset* kita dalam ber-ibukota. Apakah ada jaminan bahwa Kalimantan Timur tidak akan menjadi Jakarta kedua yang akan kembali sesak oleh migrasi urban, polusi yang pekat, hantu macet dan banjir setelah ibukota diresmikan. Atau akan seperti Jakarta yang sibuk dengan ragam masalahnya setelah ibukota diresmikan. *No body knows.*

Pemulis, antropolog IHDA Denpasar